

BAB V

PENUTUPAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penyajian dari hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa dalam analisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dalam pencegahan, penanggulangan penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya telah terlaksana dengan cukup baik bersama seluruh elemen masyarakat. Namun ditemukan juga kendala terkait penegakan pemberlakuan penerapan 3M, masih banyak ditemui pelanggar protokol kesehatan maka atas kesalahannya di tindak tegas dengan sanksi administratif ataupun juga sanksi sosial. Dalam hal penanganan covid, dikatakan baik mulai dari sosialisasi pencegahan penyebaran covid-19 hingga pengambilan tindakan oleh pelanggar Untuk kualitas kerja tidak dapat di katakan 100% sesuai, karena dalam implementasi perencanaan pemahaman berdeda dari pimpinan ke anggota lainnya. Melalui indikator yang penulis gunakan menurut Robbins adalah sebagai berikut :

1. Kualitas, kinerja dari anggota Satpol PP telah menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya dalam ketepatan melaksanakan tugas dan pekerjaan. Namun untuk kerapian dan kelengkapan di nilai kurang namun tidak seluruhnya dapat dikatakan buruk. Memang tidak semua kinerja Satpol PP buruk sehingga perlu adanya evaluasi untuk kinerja berikutnya dan mengubah pola kerja sehingga mendapatkan hasil yang optimal.
2. Kuantitas, dalam pelaksanaan kinerja yang di laksanakan oleh anggota Satpol PP dari indikator tersebut belum terlalu berdampak secara signifikan terhadap penggunaan waktu dalam bekerja. Dikarenakan keseluruhan program atau tugas – tugas masih terkontrol dengan baik
3. Kerjasama, kerjasama Satpol PP dalam bentuk kerja tim baik dari internal maupun eksternal dapat di katakan baik karena telah menyelesaikan dan sedang berjalan hingga saat ini upaya penertiban protokol kesehatan bersama jajaran instansi lainnya baik instansi pemerintahan maupun masyarakat umum
4. Inisiatif, kinerja anggota Satpol PP dalam inisiatif memunculkan program – program dimasa pandemi ini cukup beragam dan dapat dinilai positif bagi masyarakat. Karena semua hal yang di munculkan bernilai positif dan tidak merugikan kedua belah pihak antara instansi pemerintah dan masyarakat

5. Tanggung Jawab, kinerja Satpol PP cukup memuaskan dalam hal pelayanan dan tanggung jawabnya. Upaya – upaya yang di pilih selalu dapat memudahkan masyarakat dan membuat semuanya terstruktur dengan baik.

Dari 5 indikator tersebut, kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dapat di katakana cukup baik karena ada beberapa indicator yang di nilai belum berjalan maksimal.

Dalam analisis tersebut, peneliti menemukan beberapa faktor penunjang dan penghambat kegiatan Satpol PP dalam penertiban masyarakat pelanggaran perda adalah beberapa faktor, yaitu :

1. Penunjang

- 1) Banyaknya jaringan kerjasama dengan TNI, POLRI, mahasiswa dan organisasi masyarakat dalam kerjasama untuk penambahan personil di lapangan.
- 2) Kebutuhan disinfektan, masker, APD serta keperluan untuk patroli di tunjang oleh BPBD Jawa Timur
- 3) Sarana dan prasana yang mendukung serta transportasi yang siap digunakan untuk operasional

2. Penghambat

- 1) Anggaran yang hanya besar di awal kegiatan lalu semakin menipis setelah masuk di awal 2021
- 2) Kerjasama bersama mahasiswa dan organisasi masyarakat berkurang, bahkan hanya tinggal bersama TNI POLRI. Diketahui terjadi karena faktor anggaran operasional yang menipis.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan 3M dan pemikiran terbiasa berkerumun atau berkumpul sehingga sosialisasi dan kampanye jaga jarak tidak begitu berjalan sesuai yang direncanakan.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis soal kinerja Satpol PP selama pandemi, peneliti merekomendasikan beberapa saran, yaitu :

1. Di tengah pandemi covid-19 peneliti menyarankan agar tetap bekerja secara kolektif dalam upaya pencegahan virus corona dengan cara menjaga sinergitas antara beberapa instansi terkait, elemen mahasiswa dan oraganisasi masyarakat agar sirkulasi perekonomian masyarakat bisa berjalan normal seperti sedia kala

2. Peneliti menyarankan, Satpol PP Provinsi Jawa Timur mampu bersosialisasi dengan baik dalam konteks pemberian edukasi akan pentingnya vaksin untuk masyarakat secara merata.
3. Terakhir peneliti menyarankan agar pelaksanaan protokol kesehatan diterapkan secara masif guna mengantisipasi penularan virus corona yang menyebar pada kampong atau tempat tinggal warga Surabaya lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 : Pengalaman Indonesia Analysis Of Covid-19 Outbreak Handling Policy : The Experience Of Indonesia. *Junal Borneo Administrator*, 16(2), 253–270.
- Anas, F. (2021). *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Wabah Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lamongan*. 13(1), 86–108.
- Anggara, S., Afiyah, S., Farida, A. S., & Muslim, J. (2020). *Inovasi Kebijakan Publik, Penanggulangan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Jawa Barat*. 19.
- Apsari Hadi, I. G. A. (2017). Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Tindakan Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Kertha Patrika*, 39(01), 33. <https://doi.org/10.24843/kp.2017.v39.i01.p03>
- Bappenas, & UI, F. (2021). *Proyeksi COVID-19 di Indonesia*. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kedeputusan Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas. https://www.bappenas.go.id/files/8316/1476/4650/Proyeksi_Covid-19_di_Indonesia_BAPPENAS.pdf
- Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M. S. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: formulasi, implementasi & evaluasi kebijakan publik*. 307.
- Fallis, A. . (2013). Teori Kebijakan Implementasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Firmanda, R., & Adnan, M. F. (2021). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pasar Raya Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7(3), 501–507. <https://doi.org/10.36312/jime.v7i3.2299>
- Hidayat, A. (2012). Penelitian Kualitatif (Metode): Penjelasan Lengkap. *Statistikian*.
- Informasi, P. P. (2014). Tugas Dan Fungsi. 13 Juli 2014, 1–2. <https://www.kemkes.go.id/article/view/13010100003/struktur-organisasi-kementerian-kesehatan-republik-indonesia.html>
- Jatim, S. P. (1962). *Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja*. April, 1–2.
- Jatim, S. P. (2018). *Pejabat Struktural*. 1–9. <http://bcjuanda.beacukai.go.id/index.php/profil/pejabat-struktural>
- Majid, A. I., & Sunariyanto, S. M. (2021). *INTERELATION INSTITUSIONAL COLLABORATION DALAM PENAGGULANGAN BENCANA COVID 19 DI KOTA MALANG (Study Pada Satgas Covid-19 Kota Malang) Jurusan Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Admiministrasi , Universitas Islam Malang , Jl . MT Haryono 193 Malang , 65. 15(1), 64–69.*

- Maunde, R., Posumah, J., & Kolondam, H. F. (2020). *Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud*. 20–27.
- Melani, A. (2021). Kilas Balik Perjalanan Corona COVID-19 di Surabaya Sepanjang 2020. *Surabaya.Liputan6*. <https://surabaya.liputan6.com/read/4447029/kilas-balik-perjalanan-corona-covid-19-di-surabaya-sepanjang-2020>
- Organisai, S. (2015). *Struktur Organisasi Satpol PP Jatim*. 1–3. <http://satpolpp.jatimprov.go.id/site/profil/struktur-organisasi.html>
- Ozili, P. (2020). *COVID-19 in Africa : socio-economic impact , policy response and opportunities*. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-05-2020-0171>
- Rani, N., & Safarinda, E. Y. (2020). *EVALUASI KEBIJAKAN JOGO TONGGO DALAM PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI JAWA TENGAH*. 4(2), 8–15.
- Ririn Arifah. (2014). *Undang - Undang No. 32 Tahun 2004*. 634. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- Rivelino, & Ginting, A. H. (2020). *Tata Kelola Dalam Kebijakan Publik Dari Perspektif Penanganan Covid - 19 DKI Jakarta*. 13(1).
- Setiawan, P. (2021). Pengertian Penelitian - Ciri, Sikap, Syarat, Tujuan, Macam, Jenis, Para Ahli. *Guru Pendidikan*.
- Sumaedi, S., Mahatma, I. G., Bakti, Y., Rakhmawati, T., Widianti, T., Astrini, N. J., Damayanti, S., Massijaya, M. A., & Jati, R. K. (2020). *Factors influencing intention to follow the “ stay at home ” policy during the COVID-19 pandemic*. <https://doi.org/10.1108/IJHG-05-2020-0046>
- Tuwu, D. (2020). *KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19*. 3(2), 267–278. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>
- Wijaya, R. (2020). *PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG DALAM PENGAWASAN , PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19 SELAMA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)*. 2(1), 69–82.
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>